

## **ABSTRAK**

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk dalam penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penertiban serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai eksekutor dalam menegakkan aturan terkait pemasangan, bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu dan pihak terkait lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, resistensi dari peserta pemilu, serta keterbatasan sumber daya.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, termasuk peningkatan sosialisasi regulasi, koordinasi yang lebih baik antarinstansi, serta peningkatan kapasitas personel Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Probolinggo.

**Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah ,  
Penegakan Perda**

,

## **ABSTRACT**

*The Civil Service Police Unit has an important role in enforcing regional regulations, including controlling campaign props that violate regulations. This research aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit in the control process and the obstacles faced in its implementation.*

*The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. The research results show that Civil Service Police plays a role as executor in enforcing regulations related to installation, collaborating with the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and other related parties. However, in its implementation there are various obstacles, such as lack of coordination between agencies, resistance from election participants, and limited resources.*

*Therefore, a more effective strategy is needed, including increasing socialization of regulations, better coordination between agencies, as well as increasing the capacity of Civil Service Police Unit personnel in carrying out their duties in Probolinggo Regency.*

**Keywords:** *Civil Service Police Unit, Regional Regulations, Enforcement of Regional Regulations*